SYARAT-SYARAT YANG DILAKUKAN DALAM PENGAJUAN KARYA INTELEKTUAL UNTUK MENDAPATKAN HAK PATEN

EKA MEI RISTIANTI

165100091

Fakultas Komputer, 448757154

ekameiristianti.student@umitra.ac.id

Abstract

Istilah “paten” sering kita dengar banyak dipakai oleh masyarakat luas, dan bahkan tak jarang di salahpahami sebagai padanan dari istilah “ Hak Atas Kekayaan Intelektual “ itu sendiri. Namun sesungguhnya, paten hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk perlindungan HAKI. Paten adalah perlindungan HAKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya.

Invensi paten dapat berupa produk ataupun proses, sebagai contoh pembakaran pada mesin kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan . baik metode dan proses bagaimana pembakaran tersebut dilakukan, dan mesin yang menerapkan metode dan proses pembakaran itu, keduanya dapat dipatenkan masing masing sebagai proses dan paten produk.

Hak paten hanya diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan tanggal penerimaan (filing date). Paten juga bersifat teritorial, yang artinya hak paten hanya berlaku dinegara dimana permohonan paten di ajukan dan diberi.

A. INTRODUCTION

Apa itu paten ?

Istilah “paten” sering kita dengar banyak dipakai oleh masyarakat luas, dan bahkan tak jarang di salahpahami sebagai padanan dari istilah “ Hak Atas Kekayaan Intelektual “ itu sendiri. Namun sesungguhnya, paten hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk perlindungan HAKI. Paten adalah perlindungan HAKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung pemecahan/solusi teknis terhadap masalah yang terdapat pada teknologi yang telah ada sebelumnya.

Invensi paten dapat berupa produk ataupun proses, sebagai contoh pembakaran pada mesin kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungan . baik metode dan proses bagaimana pembakaran tersebut dilakukan, dan mesin yang menerapkan metode dan proses pembakaran itu, keduanya dapat

dipatenkan masing masing sebagai proses dan paten produk.

Syarat-syarat untuk karya intelektual agar dapat dipatenkan

Kategori suatu karya dan penemuan dapat dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya/penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantis. Berikut syaratnya :

1. Bersifat baru

Hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu. Baik di publikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera di ukur agar memperoleh hak paten, dengan mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal.

2. Bersifat inventif

Prinsip memperoleh paten HAKI bersifat inventif, atau kemampuan untuk menciptakan, merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Paten hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skilled in the art.

3. Bersifat aplikatif

Maksud Aplikatif hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat yang konsisten, tidak mudah berubah-ubah.

Berikut contoh prosedur untuk pengajuan hak paten

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual di KEMENKUMHAM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMOHONAN PENDAFTARAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
MELALUI KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I. untuk menerima permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Pemohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362) dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3680);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten;
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek;

Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Kekayaan Intelektual | 1

Berikut catatan untuk memperoleh hak paten

Pemilik karya intelektual disebut dengan istilah inventor. Inventor bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Inventor lebih mudah mendapatkan hak paten atas hasil penemuan karya intelektual mereka, sedangkan untuk diluar inventor terlebih dahulu memperoleh pengalihan hak secara tertulis dari sang inventor.

Apabila ada pihak lain yang memperoleh pengalihan hak dari inventor akan memiliki hak paten selama 20 tahun hak eksklusif tersebut akan menjadi publik domain. Public domain diperuntukkan untuk masyarakat umum, tentu saja tetap melakukan proses ijin pada pemegang hak paten.

Hak paten dalam HAKI bersifat teritorial. Dalam hal ini hak paten hanya berlaku di negara inventor mengajukan permohonan paten. Pengajuan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan ke direktoral jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Apabila inventor memperoleh hak paten di Indonesia, maka hak paten yang diperoleh tidak berlaku atau tidak memiliki hak paten di negara lain.

Kewajiban inventor yang memperoleh hak paten HAKI berhak membayar biaya tahunan. Biaya tersebut bagian dari biaya pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Hak paten akan hilang secara hukum apabila tidak di bayar selama tiga tahun berturut-turut. Besar

biaya pemeliharaan hak paten ditetapkan oleh PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di kementerian hukum dan HAM.

Biaya pembiayaan terdiri dari beberapa biaya yaitu biaya pokok dan biaya per klaim. Periode pembayaran setiap satu tahun sekali, berdasarkan tanggal yang sama dengan pemberian pengajuan paten pertama kali. Dengan kata lain, batas akhir pembayaran jatuh pada tanggal yang sama saat pengajuan.

Hak paten bersifat Time Sensitive

Hak paten diberikan pada inventor pertama kali yang mengajukan permohonan paten. Waktu pengajuan permohonan bersifat krusial dan bersifat time-sensitive. Dengan kata lain, apabila ada dua inventor memiliki karya intelektual yang sama persis, maka yang akan diakui adalah inventor yang lebih dahulu mengajukan permohonan.

Hak paten dalam HAKI bagi mereka yang sudah tahu, berbondong-bondong mengajukan permohonan. Biaya

permohonan hak paten sebesar Rp. 750.000,00. Sekalipun mereka sebenarnya masih ragu untuk memastikannya. Menariknya, ada sebagian yang tidak memperdulikan biaya pendaftaran paten untuk karya intelektual yang tidak komersial. Mereka tetap tidak merasa rugi, karena memperoleh hak paten lebih penting dari sekedar keuntungan secara ekonomi. Mengingat, hak paten tidak dapat dipatenkan lagi apabila sudah dipublikasikan.

Karya intelektual yang tidak dapat dipatenkan

Karya intelektual yang bersifat kreasi estetika seperti hak cipta dan desain industri relatif mudah memperoleh hak paten. Termasuk penemuan metode program komputer, presentasi mengenai informasi yang ditemukan lebih mudah memperoleh izin paten. Meskipun demikian, ada pula karya intelektual yang ternyata tidak dapat dipatenkan. Berikut penjelasannya :

1. Karya intelektual tidak menentang peraturan hak atas

kekayaan intelektual , diantaranya tidak mengumumkan karya sebelum mengajukan permohonan.

2. Hasil karya intelektual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil karya juga tidak menentang moralitas agama mengandung RAS dan mengganggu ketertiban umum.
4. Karya intelektual tidak dalam praktik coba-coba.
5. Karya intelektual bukan termasuk metode-metode dan teori. Misalnya metode pemeriksaan, pengobatan, perawatan, pembedahan, dan pengobatan, termasuk teori dan rumus matematika. Sehebat apapun rumus menyelesaikan permasalahan, tetap tidak dapat dipatenkan .

B. CONCLUSION

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa paten adalah salah satu bagian Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berfungsi

untuk melindungi suatu karya seseorang. Karya intelektual

bermacam-macam, mulai yang bersifat teknologi (invensi), penelitian, seni dan masih banyak lagi. Salah satu contoh karya intelektual invensi yang dapat dipatenkan dapat berupa produk dan proses.

Syarat-syarat untuk karya intelektual agar dapat dipatenkan :

1. Bersifat baru
2. Bersifat inventif
3. Bersifat aplikatif

Adapun karya intelektual yang tidak dapat dipatenkan :

1. Karya intelektual tidak menentang peraturan hak atas kekayaan intelektual .
2. Hasil karya intelektual tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil karya juga tidak menentang moralitas agama mengandung RAS dan mengganggu ketertiban umum.
4. Karya intelektual tidak dalam praktik coba-coba.

5. Karya intelektual bukan termasuk metode-metode dan teori.

Hak paten hanya diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan tanggal penerimaan (filing date). Paten juga bersifat teritorial, yang artinya hak paten hanya berlaku dinegara dimana permohonan paten di ajukan dan diberi.

C. ACKNOWLEDGEMENT

University Of Indonesia
University Of Mitra Indonesia
Telkom University
University Of Melbourne
Saitama University

D. REFERENCE (Based ISO 690)

- [1] A. S. Putra And O. M. Febriani, "Knowledge Management Online Application In Pdam Lampung Province," In *Prosiding International Conference On Information Technology And Business (Icibt)*, 2018, Pp. 181–187.

- [2] A. S. Putra, O. M. Febriani, And B. Bachry, "Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung," *J. Sist. Inf. Dan Manaj. Basis Data*, Vol. 1, No. 1, Pp. 21–30, 2018.
- [3] O. M. Febriani And A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, Vol. 13, No. 1, Pp. 90–98, 2014.
- [4] Putra, Arie Setya. "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer." (2018).
- [5] Putra, A. S. (2018, July 17). Paperplain Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia. Retrieved From [Osf.Io/Pbrn9](#).

E. REFERENCE (Based APA)

Putra, A. S., Aryanti, D. R., & Hartati, I. (2018, November). Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya). In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 85-97).

Sari, D. P., Febriani, O. M., & Putra, A. S. (2018, November). Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 289-294).

Putra, A. S. (2018). Paperplain: Execution Fundamental Create

Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia.

Putra, A. S., Sukri, H., & Zuhri, K. Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel. *IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems)*, 8(2), 221-232.

Darmawan, A., Yuliawati, D., Marcella, O., & Firmandala, R. (2016). Sistem Absensi dan Pelaporan Berbasis Fingerprint dan SMS Gateway. *EXPLORE*, 7(1).

Febriani, O. M., Wahyuni, T., & Yusuf, S. (2017). DESIGN OF WEBSITE-BASED INFORMATION SYSTEM FOR EDOCUMENT ADMINISTRASI IN THE COMMUNITY SERVICE UNIT (A Case Study at Rajabasa District). *INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS & TECHNOLOGY*, 16(7), 7010-7020.

Febriani, O. M., & Wahyuni, T. (2017, October). PERANCANGAN SISTEM E-DOCUMENT ADMINISTRASI LOGBOOK PENELITIAN PADA UNIT LAYANAN DI BANDAR LAMPUNG. In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 187-194).

Febriani, O. M., & Permadi, A. B. (2017). Implementasi Sistem Aplikasi Data Bimbingan dan Pelanggaran Siswa pada Sekolah Menengah Atas di Lampung Tengah dengan Metode Analisis dan Desain Sistem Terdistribusi (SSAD). *EXPERT*, 7(1).

Febriani, O. M., & Ambarwati, L. (2015). PERANCANGAN APLIKASI PENGOLAHAN DATA PENJUALAN UKM KELANTING KHAS TELO DESA SIDOHARJO KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *Jurnal Teknologi Informasi dan Bisnis Pengabdian Masyarakat Darmajaya*, 1(1), 77-95.

Febriani, O. M. (2015). Rancang Bangun Aplikasi E-commerce menggunakan Freewebstore pada UKM Kelanting di Desa Sidoharjo Lampung Selatan. *Prosiding Sembistek 2014*, 1(02), 446-458.